

# PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI JAWA BARAT

**DITERIMA**

Januari 2024

**DIREVISI**

Februari 2024

**DISETUJUI**

Maret 2024

**Qatrunnada Nisrina Ramadhani\*, Candra Fajri Ananda**Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya,  
Indonesia

**Abstract:** The objective of this study is to find out how the unemployment rate in each of West Java's districts and cities would change between 2018 and 2022 in relation to economic growth, investment, and minimum wages. Over a five-year period, a panel data collection comprising 27 districts and towns was utilized to accomplish this goal. Regression analysis with panel data was applied. The findings indicate that from 2018 to 2022, minimum wage, investment, and economic growth all had a considerable impact on the unemployment rate in all West Javan districts and cities. Economic growth holds a negative and significant effect on the unemployment rate, while investment has a negative and significant impact at 10% alpha on the unemployment rate. The minimum wage significantly and positively affects the unemployment rate. Investments made are mostly capital intensive and not yet equally distributed throughout West Java. Therefore, in order to lower unemployment, local governments are expected to increase labor-intensive investment.

**Keywords:** Unemployment Rate; Economic Growth; Investment; Minimum Wage.

**Abstrak:** Studi ini bertujuan untuk memahami dampak pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di seluruh kabupaten/kota Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2022. Untuk mencapai tujuan ini, jenis data panel dari 27 kabupaten/kota digunakan selama lima tahun. Metode analisis regresi data panel digunakan pada studi ini. Hasil studi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum secara bersamaan berdampak signifikan pada tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi memegang efek negatif dan signifikan pada tingkat pengangguran, sedangkan investasi mempunyai dampak negatif dan signifikan pada alpha 10% terhadap tingkat pengangguran. Upah minimum memiliki hasil positif dan signifikan pada tingkat pengangguran. Investasi yang dilakukan sebagian besar bersifat *capital intensive* dan belum tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Dengan demikian, pemerintah daerah sebaiknya mampu memperbesar investasi yang bersifat *labor intensive* untuk mengurangi angka pengangguran.

**Kata kunci:** Tingkat Pengangguran; Pertumbuhan Ekonomi; Investasi; Upah Minimum.

**PENULIS****KORESPONDENSI**Qatrunnada Nisrina  
Ramadhaniqatrunnadanisrina4  
@gmail.comFakultas Ekonomi dan  
Bisnis, Universitas  
Brawijaya, Indonesia**Cite this as:**

Ramadhani, Q. N & Ananda, F. A. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Jawa Barat. Journal of Development Economic and Social Studies. Volume 03, Number 2, Pages 347-361. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2024.03.2.2>

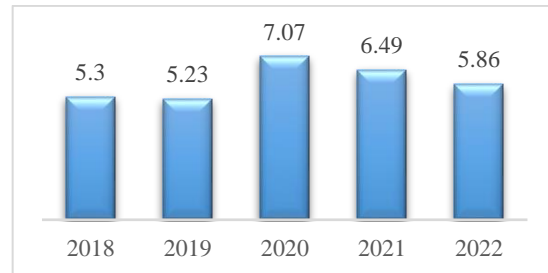
## PENDAHULUAN

Proses pembangunan ekonomi diartikan sebagai sebuah rangkaian kejadian yang kompleks yang melibatkan berbagai perubahan signifikan pada lembaga-lembaga nasional, masyarakat, dan struktur sosial. Pembangunan ekonomi berusaha untuk mempercepat ekonomi tumbuh, menangani wilayah yang terdapat ketimpangan, menghentikan kemiskinan, dan menurunkan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2020). Salah satu standar yang krusial untuk mengevaluasi pelaksanaan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang utamanya untuk menganalisis capaian pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara. Peningkatan terus-menerus dalam pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan positif ekonomi suatu negara. Jika beban sosial terus meningkat, terjadi ketidaksetaraan pendapatan, jumlah individu yang hidup di bawah ambang batas kemiskinan terus meningkat, dan tingkat pengangguran tetap tinggi, maka pertumbuhan ekonomi belum dapat dianggap berhasil (Mahroji dan Nurkhasanah, 2019).

Sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia mempunyai potensi pasar yang signifikan dalam hal sumber daya manusia. Dengan penduduk yang besar, terdapat efek pengganda yang mendorong pasar dari segi permintaan. Selain itu, sebagai penyedia tenaga kerja, jumlah penduduk yang melimpah juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dari segi penawaran. Namun, peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peluang pekerjaan yang memadai dapat menimbulkan masalah ketenagakerjaan, seperti peningkatan angka pengangguran. Tingginya perubahan dalam angkatan kerja, tanpa diimbangi oleh pertumbuhan lapangan kerja yang memadai dan penyerapan tenaga kerja yang rendah akan menciptakan ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan masalah sosial-ekonomi, termasuk peningkatan kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena lainnya di masyarakat.

Penggunaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni salah satu metode yang dapat dipakai dalam memperkirakan tingkat pengangguran. Angka TPT yang tinggi menunjukkan seberapa besar jumlah orang usia

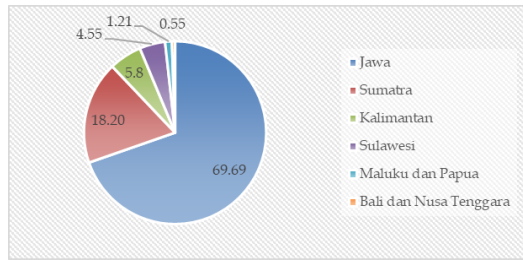
kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran. Gambar 1 berikut menunjukkan total tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2018–2022:



**Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2018-2022**

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Setiap tahun, terjadi perubahan dalam tingkat pengangguran di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam Gambar 1. Terlihat bahwa tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama tahun 2018–2022 adalah 7,07 persen yang terjadi tahun 2020. Seperti yang diketahui bahwa peningkatan tersebut terjadi karena adanya Covid-19. Namun, tahun 2021 dan 2022, tingkat pengangguran menurun menjadi 6,49 persen dan 5,86 persen. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri, Pulau Jawa seharusnya memiliki kapasitas untuk menampung tenaga kerja guna mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor industri pengolahan, yakni mampu menyumbang 68,04% dari PDB nasional. Di samping itu, sektor industri di Pulau Jawa berpotensi menjadi sektor utama dengan andil 28,33% terhadap PDRB. Sementara itu, kontribusi wilayah lainnya masih terbatas, seperti Pulau Sumatra dan Kalimantan yang hanya menyumbang 20,67% dan 16,84% (Badan Pusat Statistik, 2023). Berbeda dengan pulau-pulau lain di wilayah tengah dan timur Indonesia, meskipun luasnya wilayah dan besarnya potensi alam yang dimiliki, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian nasional tergolong kecil (Gambar 2).



**Gambar 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDB Nasional Tahun 2022**

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memegang peranan penting dalam penerimaan tenaga kerja adalah Jawa Barat. Ini disebabkan oleh kontribusi sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Barat sebesar 34,72% terhadap PDRB Pulau Jawa, yang menjadikannya contoh yang baik untuk pembangunan wilayah industri di luar Jawa. Pentingnya pembangunan kawasan industri yang terintegrasi terletak pada kemampuannya untuk merangsang pertumbuhan industri dan ekonomi nasional melalui penciptaan sejumlah besar peluang pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah penduduk, Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran tertinggi di seluruh Jawa pada periode 2018–2022, seperti terlihat dalam Tabel 1. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran di provinsi tersebut mencapai 8,23%, mengalami penurunan menjadi 8,04% pada tahun 2019, dan kembali naik menjadi 10,46% pada tahun 2020. Selanjutnya, terjadi penurunan dari tahun 2021 hingga 2022 menjadi 9,82% dan 8,31%. Meskipun demikian, angka-angka tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional pada tahun 2022 yang hanya sebesar 5,86%. Fakta ini mengungkapkan jika tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tetap berada pada tingkat yang cukup tinggi. Jika dilihat dari pertumbuhan pengangguran Jawa Barat yakni sebesar 4%, sedangkan pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Barat yaitu 0,57%. Pertumbuhan pengangguran di Jawa Barat menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

Hal itu mengindikasikan adanya fenomena tidak terserapnya tenaga kerja secara maksimal sehingga menyebabkan masalah pengangguran sehingga perlu untuk diteliti.

**Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2018-2022**

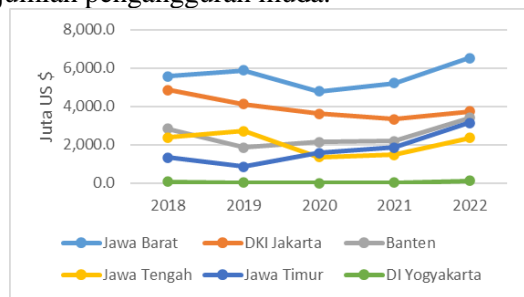
Provinsi	Tahun					Rat a-rat a
	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Jawa Barat</b>	8.23	8.04	10.46	9.82	8.31	8.97
<b>Banten</b>	8.47	8.11	10.64	8.98	8.09	8.86
<b>DKI Jakarta</b>	6.24	6.22	10.95	8.58	7.18	7.82
<b>Jawa Tengah</b>	4.47	4.44	6.48	5.95	5.57	5.38
<b>Jawa Timur</b>	3.91	3.82	5.84	5.74	5.49	4.96
<b>DI Yogyakarta</b>	3.37	3.18	4.57	4.56	4.06	3.95

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Dalam penelitian oleh Setiawan, Saleh dan Yuliati (2017) dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terpengaruh oleh sejumlah faktor, salah satunya ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika pembuatan barang dan jasa oleh masyarakat meningkat yang kemudian berkontribusi pada peningkatan tingkat kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu bisa diamati dari besarnya angka PDRB. Jika dilihat dari besarnya PDRB, maka Jawa Barat menduduki posisi ketiga tertinggi di Pulau Jawa. Posisi tersebut di bawah DKI Jakarta dan Jawa Timur (Badan Pusat Statistik, 2023). Dengan tingginya Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan Jawa Barat, seharusnya mampu membuat angka pengangguran rendah sesuai dengan teori Hukum Okun. Akan tetapi, faktanya tingkat pengangguran Jawa Barat

masih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

Suatu kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah agar meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja adalah investasi. Dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, investasi ini mencakup penanaman modal baik dari luar negeri maupun domestik yang ditanamkan di Indonesia. Menurut penelitian oleh Hasan dan Sasana (2020) menyebutkan bahwa peningkatan pada investasi asing di sebuah negara akan mengurangi tingkat pengangguran muda melalui penyediaan kesempatan kerja untuk pekerja muda. Oleh karena itu, semakin tinggi investasi asing mampu mengurangi jumlah pengangguran muda.



**Gambar 3. Investasi PMA Menurut Provinsi di Pulau Jawa**

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan grafik di gambar 3, Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan pada realisasi investasi PMA. Tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang mencatatkan realisasi Penanaman Modal Asing tertinggi di Jawa (Badan Pusat Statistik, 2023). Sedangkan jika dilihat dari realisasi PMDN, Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua terbesar setelah DKI Jakarta. Dengan kondisi tersebut, maka kesempatan kerja bagi para pekerja seharusnya ikut meningkat sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Namun, tingkat PMA dan PMDN yang tinggi belum mencapai hasil yang diinginkan; pada tahun 2022, jika disandingkan 34 provinsi lainnya di Indonesia, Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran tertinggi, mencapai 8,31%. Tingkat kedua adalah Provinsi Kepulauan Riau, dengan nilai 8,23%. Sedangkan tingkat pengangguran terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat hanya mencapai 2,34%. Menurut teori Harrod Domar, investasi memperkuat kapasitas produksi sekaligus mewujudkan permintaan

(Mulyadi, 2003). Artinya, dengan asumsi *full employment*, kapasitas produksi berkorelasi positif dengan kebutuhan tenaga kerja. Akibatnya, perekonomian akan memiliki kemampuan untuk mempekerjakan lebih banyak orang yang berarti lebih banyak orang akan terlibat dalam pekerjaan dan lebih sedikit pengangguran.

Berdasarkan berbagai faktor, tingkat pengangguran dapat dipengaruhi oleh tingkat upah. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur persoalan upah minimum. Pada pasal 88 ayat (2) berisi tentang pengupahan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat sebagai langkah untuk memastikan pekerja/buruh memiliki hak atas penghidupan yang layak sesuai dengan norma kemanusiaan. Penetapan upah minimum merupakan kebijakan yang dilakukan setiap tahun dan mengacu pada PP No. 51 Tahun 2023. Tujuan dari peraturan upah minimum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum, khususnya para pekerja. Studi oleh Septiyanto dan Tusianti (2020) menyebutkan apabila terdapat relasi positif antara upah minimum kabupaten dan tingkat pengangguran di Jawa Barat Tahun 2013-2017. Permintaan tenaga kerja akan menurun ketika upah minimum meningkat, tetapi, dari sudut pandang pasokan tenaga kerja, terjadi kenaikan kemudian ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran ini dapat mengakibatkan tingkat pengangguran.

Penelitian yang membahas tentang tingkat pengangguran telah banyak dilakukan seperti Setiawan, Saleh dan Yulianti (2017) dan Alkofahi (2020) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif dan signifikan pada tingkat pengangguran terbuka. Pada studi yang dilaksanakan oleh Helvira dan Rizki (2020) menyimpulkan bahwa Investasi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat, tetapi upah minimum berdampak positif signifikan. Sementara itu, studi yang dilakukan Hasan dan Sasana (2020) berbeda dengan hasil Helvira dan Rizki (2020) bahwa GDP, FDI, dan inflasi berdampak negatif dan signifikan terhadap pengangguran kaum muda di negara ASEAN.

Penelitian tentang tingkat pengangguran di Jawa Barat juga pernah dilakukan oleh Septiyanto dan Tusianti (2020) yang menghasilkan bahwa TPAK, UMK, dan tenaga



kerja sektor industri mempunyai pengaruh pada tingkat pengangguran. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2013-2017, sementara untuk tahun terbaru 2018-2022 masih belum banyak dilakukan. Penambahan variabel berupa investasi digunakan oleh penulis untuk memberikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis berencana untuk melakukan penelitian ulang mengenai dampak Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Upah Minimum pada angka pengangguran di Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2022.

Tingkat pengangguran yang tinggi di Provinsi Jawa Barat, terutama jika dilihat dengan wilayah sekitar di Pulau Jawa selama periode 2018-2022, bahkan mencapai posisi pertama secara nasional pada tahun 2022 dengan tingkat 8,31%, sementara investasi asing di provinsi tersebut juga mencapai peringkat teratas bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya di Pulau Jawa dan variabel lain yang memengaruhi tingkat pengangguran, ini menjadi motivasi menarik bagi penulis untuk menjalankan penelitian mengenai isu pengangguran di Jawa Barat. Studi ini bertujuan memberikan saran bagi para pembuat keputusan dan pemangku kepentingan untuk menciptakan strategi yang dapat mengatasi masalah pengangguran di Jawa Barat.

## KAJIAN PUSTAKA

### Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan angkatan kerja yang menganggur dan merupakan indikator utama kesehatan ekonomi. Tingkat pengangguran terkait erat dengan output agregat ekonomi (Case, Fair dan Oster, 2012). Terdapat tiga jenis pengangguran yaitu pengangguran *frictional*, *structural*, dan *cyclical*. Pengangguran friksional merupakan porsi pengangguran yang penyebabnya adalah perputaran normal di pasar tenaga kerja; digunakan untuk menunjukkan masalah pencocokan pekerjaan atau keterampilan dalam jangka pendek. Porsi pengangguran yang penyebabnya berupa pergeseran dalam struktur ekonomi yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan secara signifikan pekerjaan di industri tertentu adalah definisi dari pengangguran struktural. Sedangkan

pengangguran siklis yaitu penyimpangan pengangguran dari tingkat alamiahnya.

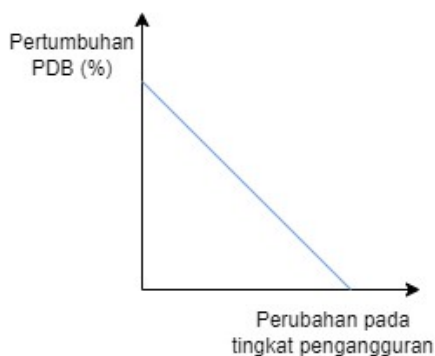
Penduduk usia kerja merujuk kepada penduduk dengan usia lima belas tahun atau lebih, dan bisa dikategorikan atas dua kelompok, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2014). Angkatan kerja merupakan kategori yang mencakup penduduk dalam rentang usia kerja yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sedang tidak aktif sementara, serta individu yang tidak memiliki pekerjaan. Sementara itu, kategori bukan angkatan kerja meliputi penduduk usia kerja yang masih bersekolah, menjalankan tugas rumah tangga, atau terlibat dalam kegiatan lain selain aktivitas pekerjaan pribadi. Empat kategori pengangguran terbuka didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai berikut: (1) Seseorang yang sedang mencari pekerjaan dan mengajukan lamaran; (2) Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan tengah bersiap-siap untuk mendapatkannya; (3) Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan merasa sulit untuk memperolehnya, sehingga tidak mengajukan lamaran; dan (4) Seseorang yang telah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai tugasnya. Persentase pengangguran dibagi oleh jumlah angkatan kerja menghasilkan tingkat pengangguran terbuka.

### Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. PDB mencakup seluruh output dan layanan yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi di dalam batas wilayah negara tersebut (Case, Fair dan Oster, 2012). Kapasitas sumber daya perekonomian suatu daerah, pergeseran, dan struktur perekonomian diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonomi riil atau pertumbuhan yang tidak terpengaruh oleh variabel harga diukur setiap tahun dengan menggunakan PDRB konstan.

Hukum Okun yang diuraikan dalam Case, Fair dan Oster (2012) menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, terdapat hubungan erat antara output (pertumbuhan ekonomi) dan tingkat pengangguran. Tingkat

pengangguran menurun sekitar 1 persen untuk setiap peningkatan PDB riil sebesar 3 persen. Dalam situasi ini, terdapat korelasi negatif linear antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran, seiring dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang merangsang pembentukan lapangan kerja.



**Gambar 4. Kurva Hukum Okun**

(Sumber: Mankiw, Quah dan Wilson, 2014)

#### Investasi Dalam Negeri dan Asings

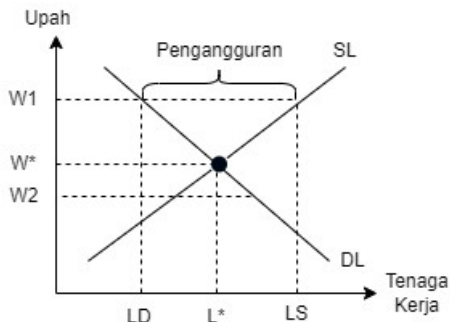
Mankiw, Quah dan Wilson (2014) mendefinisikan investasi sebagai proses membeli barang yang nantinya dimanfaatkan untuk menciptakan lebih banyak barang dan jasa di masa depan. Penanaman modal akan menaikkan permintaan atas faktor produksi, sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, peningkatan pendapatan masyarakat akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Saputri dan Ananda, 2023). Penanaman modal terbagi atas dua macam, yaitu penanaman modal pemerintah dan swasta yang dibagi lagi menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Hal tersebut di Indonesia diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman modal mencakup semua aktivitas investasi yang dilakukan di Indonesia, baik itu oleh investor asing maupun domestik. Perbedaan antara PMA dan PMDN terletak pada pelaku penanam modal. Jika berasal dari dalam negeri disebut PMDN, sedangkan penanam modal investor asing disebut PMA. PMA juga sering disebut dengan FDI (*Foreign Direct Investment*) yang dapat didefinisikan sebagai investasi dalam perusahaan yang dilakukan di

suatu negara oleh penduduk di luar negara tersebut (Case, Fair dan Oster, 2012).

Menurut teori Harrod Domar, yang diuraikan dalam Mulyadi (2003), investasi bukan hanya memperkuat kapasitas produksi sekaligus mewujudkan permintaan. Artinya, semakin besar kapasitas produksi yang diperluas, semakin meningkat pula kebutuhan akan tenaga kerja, dengan asumsi pencapaian *full employment*. Investasi memperhatikan penambahan faktor produksi, termasuk tenaga kerja, sehingga ekonomi secara menyeluruh mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih besar. Hal ini pada gilirannya meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Todaro dan Smith (2020) juga menjelaskan bahwa investasi memiliki peran sentral dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan melakukan investasi dalam pembentukan modal, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, pendapatan nasional meningkat, dan peluang penciptaan lapangan kerja baru terbuka. Oleh karena itu, investasi memiliki potensi untuk memperluas kesempatan kerja yang dapat mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran.

#### Upah Minimum

Upah minimum yaitu upah terendah yang diizinkan perusahaan untuk membayar pekerja. Jika peraturan upah minimum mewajibkan tingkat upah berada di atas titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan meningkat, sementara permintaan tenaga kerja akan berkurang. Jumlah pekerja yang ingin bekerja lebih besar daripada jumlah pekerjaan yang tersedia sehingga terjadi surplus tenaga kerja. Menurut Mankiw, Quah dan Wilson (2014), hal-hal seperti kekakuan upah atau ketidakmampuan upah untuk beradaptasi dengan keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja memengaruhi pengangguran. Menurut pandangannya, menetapkan tingkat upah minimum yang lebih rendah dapat memotivasi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan lebih banyak, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Keynes dalam karyanya "*The General Theory*" menyatakan bahwa peningkatan peluang kerja hanya dapat terjadi jika tingkat upah riil mengalami penurunan.



**Gambar 5. Kurva Keseimbangan di Pasar Tenaga Kerja**  
(Sumber: Borjas, 2010)

**Pengembangan Hipotesis**

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi nantinya mengurangi tingkat pengangguran (Alkofahi, 2020; Michael dan Geetha, 2020). Meningkatnya ekonomi di tingkat lokal akan menghasilkan lebih banyak peluang pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu, studi sebelumnya mengemukakan bahwasanya investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap angka pengangguran (Kukaj, Nimani dan Usaj, 2022; Gómez dan Irewole, 2023; Sabado, Millan dan Asoy, 2023). Melalui peningkatan pada investasi asing langsung di sebuah negara akan mengurangi tingkat pengangguran melalui penyediaan kesempatan kerja untuk pekerja. Kemudian telah dilakukan studi yang mengemukakan bahwa upah minimum berdampak positif signifikan terhadap angka pengangguran karena tidak semua perusahaan mampu membayar tingkat upah tertentu, peningkatan tingkat upah tidak selalu berdampak positif pada tenaga kerja yang diminta (Helvira dan Rizki, 2020; Christianto, Prasetyani dan Rawidyo Putr, 2022; Vitaliano, 2023).

Dengan merujuk pada tujuan penelitian dan telaah literatur sebelumnya, rumusan dari hipotesis penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut:

H1: Terdapat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak negatif dan

**Kerangka Pikir Penelitian**

Kerangka pikir dari penelitian ini meliputi:



**Gambar 6. Kerangka Pikir Penelitian**

signifikan pada tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

H2: Terdapat dugaan bahwa investasi memiliki dampak negatif dan signifikan pada tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

H3: Terdapat dugaan bahwa upah minimum memiliki dampak positif dan signifikan pada tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

**METODE**

**Jenis Penelitian**

Riset ini memakai pendekatan kuantitatif dan jenis studi asosiatif. Fenomena yang digambarkan dalam riset ini yaitu tingginya tingkat pengangguran disamping tingginya realisasi penanaman modal yang ada di Jawa Barat, dan variabel lain yang memengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Barat seperti Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum.

**Definisi Operasional Variabel**

**Tabel 2. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Satuan
<b>Tingkat Pengangguran (Y)</b>	Persentase pengangguran dibagi oleh total angkatan kerja.	Persen
<b>Pertumbuhan Ekonomi (X1)</b>	Pertumbuhan total Produk Domestik Regional Bruto per Kabupaten/Kota	Persen

	di Jawa Barat dengan menggunakan harga yang tetap (ADHK).	
<b>Investasi (X2)</b>	Jumlah realisasi penanaman modal ke dalam suatu wilayah, baik bersumber dalam negeri maupun asing.	Rupiah
<b>Upah Minimum (X3)</b>	Upah minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.	Rupiah

**Sampel Penelitian**

Penggunaan sampel meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Upah Minimum Kabupaten dan Kota di 18 Kabupaten serta 9 Kota di Jawa Barat selama rentang waktu 2018-2022.

**Sumber Data**

Data untuk keperluan studi berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Open Data Jawa Barat. Informasi mengenai tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum kabupaten/kota selama periode 2018-2022 diambil dari data BPS Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, data investasi, termasuk realisasi penanaman modal, baik domestik maupun luar negeri selama tahun 2018-2022 diperoleh dari website Open Data Jawa Barat.

**Metode Pengumpulan Data**

Penghimpunan data diterapkan melalui pendekatan dokumentasi. Studi dokumentasi dilaksanakan melalui pengumpulan data sekunder dari jurnal, buku, literatur, internet, dan data-data resmi dari website Open Data Jawa Barat dan BPS Jawa Barat.

**Metode Analisis Data**

Dalam studi ini, data diproses memakai metode regresi data panel melalui dukungan perangkat lunak statistik Eviews 10 untuk menguji hipotesis sementara. Pendekatan pemodelan data panel menggabungkan

informasi dari berbagai titik waktu dan lokasi, sehingga memberikan hasil yang lebih komprehensif, variatif, dan efisien. Tahapan-tahapan regresi yang dilalui mencakup Uji Pemilihan Model yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Setelah diperoleh pemilihan model yang paling baik, dilanjutkan dengan Uji Asumsi Klasik meliputi Uji Normalitas, Multikolinieritas, dan Heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan Uji F (simultan), Uji T (parsial), dan Uji Koefisien Determinasi. Dengan demikian, pembentukan model data panel dilakukan seperti berikut ini:  $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 \text{Log } X2_{it} + \beta_3 \text{Log } X3_{it} + \epsilon_{it}$

Keterangan:

- Y = Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
- X1 = Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK (persen)
- X2 = Realisasi PMA dan PMDN (rupiah)
- X3 = Upah Minimum Kabupaten/Kota (rupiah)
- i = ruang
- t = periode waktu
- $\beta_0$  = konstanta
- $\beta_i$  = Koefisien Regresi Variabel Independen, di mana  $i = 1,2,3$
- $\epsilon$  = error term.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Pemilihan Model**

Proses penentuan model regresi pada data panel dilakukan untuk merumuskan persamaan yang akan digunakan. Dari Tabel 3, hasil Uji Chow memperlihatkan Probabilitas sebesar 0,0000, yang menunjukkan tingkat signifikansi yang rendah dari 0,05 sehingga dipilih model Fixed Effect. Selanjutnya, Uji Hausman memperlihatkan Probabilitas sebesar 0,4276 > 5%, yang berarti model yang terpilih yaitu Random Effect Model. Hasil Uji Lagrange Multiplier memperlihatkan Probabilitas sebesar 0,0000, sehingga model yang terpilih adalah Random Effect Model.

**Tabel 3. Hasil Uji Spesifikasi Model**

Pengujian	Hasil	Kesimpulan
<b>Uji Chow</b>	Prob 0,0000 P Value < 5%	FEM (Fixed Effect Model)



<b>Uji Hausman</b>	Prob 0,4276 P Value > 5%	REM (Random Effect Model)
<b>Uji Lagrange Multiplier</b>	Prob 0,0000 P Value < 5%	REM (Random Effect Model)

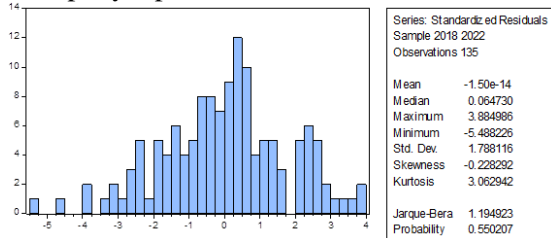
Sumber: Eviews-10, data diolah peneliti (2023)

**Uji Asumsi Klasik**

Uji Normalitas, Multikolinieritas, dan Heteroskedastisitas adalah beberapa pemeriksaan asumsi klasik yang digunakan untuk menilai hasil estimasi yang linier, tidak bias, dan memiliki varian yang konstan atau memenuhi nilai BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Pada data panel tidak perlu dilaksanakan Uji Autokorelasi karena uji tersebut hanya ada dalam data deret waktu (Basuki dan Prawoto, 2017).

**Uji Normalitas**

Dalam Gujarati dan Porter (2009) normalitas untuk memastikan sebaran data berdistribusi normal. Jika melihat hasil gambar 7 nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar  $0,550207 > 0,05$  tingkat signifikansi maka data mempunyai persebaran normal.



**Gambar 7. Uji Normalitas**  
(Sumber: Eviews-10, 2023)

**Uji Multikolinieritas**

Korelasi antar masing-masing variabel independen  $< 0,8$  menggunakan metode Correlation. Maka, model regresi ini tidak menunjukkan gejala multikolinieritas dan tahap selanjutnya dapat dilanjutkan.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas**

	PE	LOG (INV)	LOG (UMK)
PE	1.00000 0	- 0.042799	-0.109981
LOG (INV)	- 0.042799	1.00000 0	0.701448
LOG (UMK)	- 0.109981	0.70144 8	1.000000

Sumber: Eviews-10, data diolah peneliti (2023)

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas yang tertera pada tabel 5 menggunakan metode Uji Glejser yaitu melihat Probabilitas variabel independen yang tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dari hasilnya terbukti bahwa tidak menunjukkan adanya persoalan heteroskedastisitas.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	1.841819	0.0678
PE	-1.662333	0.0988
LOG(INV)	-0.594512	0.5532
LOG(UMK)	-1.291799	0.1987

Sumber: Eviews-10, data diolah peneliti (2023)

**Hasil Regresi Data Panel**

Tabel 6 memperlihatkan temuan regresi data panel yang mengindikasikan bahwa variabel X1 mempunyai pengaruh sebesar -0.276518 terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, sedangkan variabel X2 memiliki pengaruh sebesar -0.145319, dan variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar 3.509328. Berdasarkan nilai Adjusted R-Squared, persamaan dalam model ini dapat menjelaskan pengaruh variabel sebesar 52,34% dan 47,66% di luar model. Hasil uji F (simultan) memperlihatkan bahwa nilai Probabilitas F-statistic sebesar 0.000000 adalah kurang dari 0.05 taraf signifikansi. Ini berarti semua variabel yang berkaitan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat adalah signifikan.

**Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel**

Variab le	Coeffici ent	Std. Error	t- Statistic	Prob.
C	- 38.37995	11.62170	- 3.302440	0.0012
PE	- 0.276518	0.029028	- 9.526001	0.0000*
LOG (INV)	- 0.145319	0.077974	- 1.863675	0.0646**
LOG (UMK)	3.509328	0.829237	4.231999	0.0000*
R-square d	0.534093	Mean dependent var		1.989180
Adjusted R-square d	0.523424	S.D. dependent var		1.266985
S.E. of regression	0.874656	Sum squared resid		100.2181
F-statistic	50.05743	Durbin-Watson stat		1.384386
Prob(F - statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews-10, data diolah peneliti (2023)  
 Keterangan: \* = signifikansi 5%, \*\* = signifikansi 10%.

Tabel tersebut memperlihatkan data atau informasi yang diperoleh regresi data panel menggunakan Random Effect Model, serta hasil perhitungan pengaruh variabel independen Pertumbuhan Ekonomi (X1), Investasi (X2), dan Upah Minimum (X3)

terhadap tingkat pengangguran (Y), yang mana persamaannya adalah sebagai berikut:  
 $Y_{it} = -38.37995 - 0.276518 X1_{it} - 0.145319 X2_{it} + 3.509328 X3_{it} + \epsilon_{it}$

**Pengujian Hipotesis**

Pada pengujian parsial menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X1) nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < 0,05$  taraf signifikansi. Dengan koefisien pengaruh sebesar  $-0.276518$  di mana berpengaruh signifikan dan negatif sehingga jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen, maka secara rata-rata tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan sebesar 0,27 persen.

Investasi (X2) di Jawa Barat tidak memberikan dampak yang signifikan secara individu yaitu probabilitas  $0.0646 > 0,05$  dengan koefisien sebesar  $-0.145319$ . Jika menggunakan signifikansi 0,10 maka investasi berpengaruh negatif signifikan. Ketika investasi dalam negeri maupun luar negeri meningkat 1%, maka secara rata-rata pengangguran turun 0,14 persen.

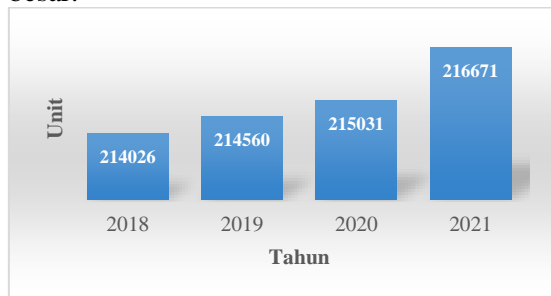
Upah Minimum (X3) di Jawa Barat memiliki hasil uji t (parsial) yaitu probabilitas  $0.0000 < 0,05$  di mana koefisien bernilai 3,509328. Hal ini berarti Upah Minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat pengangguran. Ketika upah mengalami kenaikan 1 persen, maka pengangguran meningkat sebesar 3,50 persen.

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Pengangguran**

Peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengindikasikan peningkatan nilai tambah output atau penjualan di seluruh unit ekonomi suatu wilayah. Dengan peningkatan ini, perusahaan cenderung meningkatkan permintaan tenaga kerja untuk mengimbangi pertumbuhan penjualan yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Konsep ini sesuai dengan teori Hukum Okun, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif cenderung diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Saat ekonomi berkembang, aktivitas ekonomi keseluruhan juga berkembang, menyebabkan peningkatan output. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja bertambah, dan jumlah pekerjaan yang

tersedia meningkat yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini membuktikan asumsi linearitas yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti penurunan angka pengangguran (Lequiller dan Blades, 2014).

Pada tahun 2022 sektor industri menjadi kontributor tertinggi pada struktur PDRB Jawa Barat sebesar 42,24% dengan laju pertumbuhan 7%. Pertumbuhan sektor pengolahan dan ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,45%. Jika dilihat secara spasial, Kabupaten yang berkontribusi tertinggi pada PDRB Jawa Barat tahun 2022 adalah Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Karawang. Jumlah industri kecil, menengah, dan besar di Jawa Barat juga terus mengalami kenaikan pada tahun 2017-2021 seperti yang tertera pada gambar 8. Pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dan penciptaan lapangan kerja dapat dipengaruhi oleh industri, yang memberikan nilai tambah pada perekonomian dan menciptakan dampak pengganda yang besar.



**Gambar 8. Jumlah Unit Industri Kecil, Menengah dan Besar di Jawa Barat**

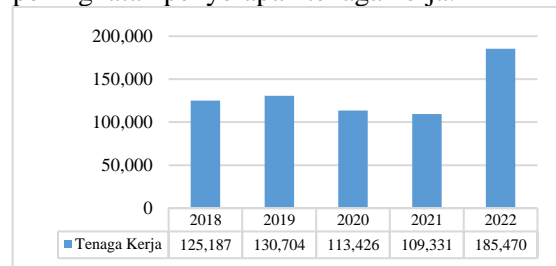
(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, 2023)

Studi sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan UMKM dan menyediakan lebih banyak kesempatan lapangan kerja (Efrianti, Irawan dan Akbar, 2021; Wirawan dan Sentosa, 2021). Hal ini dilakukan dalam rangka menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu, ekonomi dianggap berkembang ketika produksi barang dan jasa meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya produksi, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja,

menyebabkan peningkatan peluang kerja dan potensi penurunan tingkat pengangguran.

**Pengaruh Investasi Pada Pengangguran**

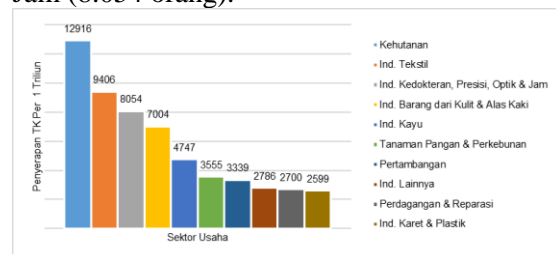
Hasil studi sesuai dengan teori investasi Harrod Domar, yang mengklaim bahwa peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan permintaan yang pada akhirnya akan membuat peluang pekerjaan dan menampung angkatan kerja. Investasi di Jawa Barat relatif tinggi, dampaknya terlihat dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja.



**Gambar 9. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan PMA dan PMDN**

(Sumber: DPMPSTP Jawa Barat, 2022)

Jumlah penyerapan tenaga kerja tertinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 185.470 jiwa. Hal itu karena terjadi realisasi investasi yang tinggi pada tahun tersebut sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Meskipun demikian, distribusi investasi di Jawa Barat masih belum merata di seluruh wilayah, sebagian besar investasi masih terfokus di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor (DPMPSTP Jawa Barat, 2022). Pada tahun 2022, sektor usaha dengan rasio penyerapan tenaga kerja tertinggi per Rp1 Triliun adalah Kehutanan (12.916 orang), Industri Tekstil (9.406 orang), dan Industri Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam (8.054 orang).



**Gambar 10. Sektor Usaha dengan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi Tahun 2022**

(Sumber: DPMPSTP Jawa Barat, 2022)

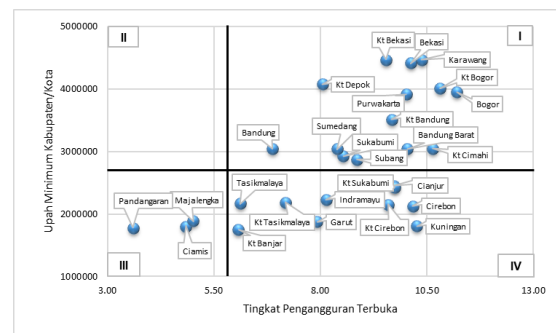
Beberapa faktor yang mendukung pencapaian realisasi investasi di Jawa Barat mencakup beberapa aspek. Pertama, infrastruktur di Jawa Barat terbilang sangat memadai, dengan sembilan ruas jalan tol yang sedang dibangun di berbagai daerah, serta proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung menjadikannya proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Selain itu, Pelabuhan Patimban, yang terletak di wilayah Metropolitan Rebana di utara Jawa Barat, juga sedang dalam tahap pembangunan dan ketika selesai akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) di Jawa Barat dinilai sangat produktif oleh para investor. Hal ini tercermin dalam pembayaran upah yang tinggi kepada para pekerja, seiring dengan tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh SDM di wilayah tersebut. Ketiga, terdapat kemudahan dalam proses pengurusan perizinan di Jawa Barat, yang menjadi faktor penting dalam mendukung investasi (Bappenas, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Mkombe *et al.* (2021) menghasilkan temuan yaitu Investasi Langsung Asing (FDI) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengangguran pemuda di wilayah Southern African Development Community. Hal ini disebabkan oleh jenis FDI di wilayah tersebut sebagian besar adalah Merger and Acquisition (M&A) di mana memiliki kapasitas penciptaan lapangan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi Greenfield. Untuk mengurangi pengangguran pemuda, pemerintah di wilayah tersebut seharusnya mengejar kebijakan FDI yang menyerap tenaga kerja, menarik investasi Greenfield, dan mengarahkan investasi ke sektor pertanian karena sektor ini memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya.

**Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada Pengangguran**

Temuan dari penelitian ini konsisten dengan konsep atau teori yang telah diajukan yaitu teori kekakuan upah. Teori ini menyatakan bahwa tingkat pengangguran akan meningkat seiring dengan kenaikan upah. Dengan kenaikan upah minimum secara tahunan, kebutuhan tenaga kerja di sektor formal akan mengalami penurunan. Ada

kemungkinan besar bahwa peraturan yang menetapkan upah minimum yang tinggi dapat meningkatkan tingkat pengangguran di antara pekerja dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang kurang (Mankiw, 2007). Secara teori, kenaikan upah akan mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran. Apabila tingkat upah meningkat tanpa adanya kenaikan harga input lainnya, maka biaya tenaga kerja relatif menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan input lainnya. Ini mendorong pelaku usaha untuk menggantikan pekerja yang memiliki biaya lebih tinggi dengan menggunakan input lain yang lebih *cost-effective* guna menjaga profitabilitas. Peningkatan upah juga dapat mendorong perusahaan untuk menaikkan harga per unit produk yang kemudian dapat mengakibatkan penurunan konsumsi oleh konsumen. Dampaknya adalah berkurangnya penjualan produk yang pada gilirannya mengakibatkan produsen menjadi terpaksa mengurangi volume produksinya. Penurunan produksi tersebut akan berimplikasi pada pengurangan kebutuhan tenaga kerja.



**Gambar 11. Rerata perbandingan upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat tahun 2018-2022**

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Gambar di atas menunjukkan variabel upah minimum dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Kuadran I (satu) menunjukkan kabupaten/kota dengan upah minimum tingkat yang tinggi namun diikuti dengan tingkat pengangguran tinggi; kabupaten/kota ini adalah Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung, dan semua kabupaten/kota yang berada dalam kondisi tersebut. Studi sebelumnya menemukan bahwa daerah yang memiliki tingkat Upah Minimum



Kabupaten/Kota dan Tingkat Pengangguran yang tinggi menunjukkan tingkat daya tarik pekerjaan yang besar dan upah minimum yang tinggi di wilayah tersebut, sehingga banyak pencari kerja tertarik untuk menetap di wilayah tersebut (Septiyanto dan Tusianti, 2020;

Prayitno dan Kusumawardani, 2022). Akan tetapi, penduduk lokal yang ada di wilayah tersebut belum mampu menyesuaikan dengan *skill* yang dibutuhkan untuk bekerja, sehingga tenaga kerja yang terserap adalah pendatang dari daerah lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dengan menerapkan metode analisis regresi data panel, tujuan dari studi ini adalah menginvestigasi dampak pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum pada tingkat pengangguran di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2022.

Hasil analisis dan model yang digunakan dalam penelitian ini mencapai tujuan tersebut. Studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat selama periode 2018-2022. Hal ini dilihat dari adanya kenaikan jumlah industri kecil, menengah, dan besar yang ada di Jawa Barat. Dengan meningkatnya pertumbuhan industri, tenaga kerja semakin banyak dibutuhkan dan angka pengangguran mampu diturunkan. Variabel investasi, baik dalam negeri maupun asing, secara parsial memiliki dampak negatif dan signifikan pada taraf signifikansi 10% terhadap tingkat pengangguran di Jawa Barat dalam rentang waktu yang diteliti. Investasi yang telah dilakukan selama ini mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Meskipun demikian, Investasi di Jawa Barat masih belum tersebar secara merata di semua wilayah dan masih terpusat di daerah tertentu saja. Sementara itu, upah minimum, secara parsial, menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Ketika upah minimum meningkat, perusahaan akan memangkas tenaga kerja untuk menjaga profitabilitas dan hasilnya adalah pengangguran. Selama periode penelitian tahun 2018-2022, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran.

### Saran

Pemerintah dapat mendorong sektor-sektor industri yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan mampu menciptakan lapangan kerja. Selain itu, sektor publik dan sektor swasta dapat membangun kemitraan untuk menciptakan proyek-proyek strategis dan mendukung inisiatif pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja. Pemerintah dapat memperbesar industri yang telah ada agar mampu bertahan dan menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah daerah dapat menarik investasi, khususnya investasi yang berpotensi untuk menyerap tenaga kerja (padat karya). Kemudian, pemerintah dapat mendorong diversifikasi investasi ke wilayah-wilayah yang belum mendapatkan distribusi investasi yang merata, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat ditingkatkan secara lebih merata.

Pemerintah dapat memberlakukan kebijakan insentif pajak kepada perusahaan yang mampu mempertahankan atau meningkatkan jumlah pekerja setelah adanya kenaikan upah. Keringanan pajak mampu mendorong bisnis untuk tetap beroperasi dan mempertahankan lapangan kerja agar tidak menambah angka pengangguran. Pemerintah dapat berhati-hati dalam menentukan upah minimum agar mampu melindungi para pekerja dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja.

### IMPLIKASI

Riset ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang berharga atau memberikan kontribusi literatur yang berarti untuk penelitian yang akan datang. Selain itu, harapannya adalah hasil riset dapat memberikan kontribusi positif sebagai saran kepada pemerintah daerah di Jawa Barat dalam mengurangi tingkat pengangguran, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan menerapkan kebijakan investasi yang mendukung penyerapan tenaga kerja.

**KETERBATASAN PENELITIAN**

Model pada riset ini masih terbatas dalam menjelaskan fenomena yang terjadi yaitu hanya menggunakan tiga variabel independen dan lima tahun penelitian yang terbatas. Sebanyak 47% masih dipengaruhi oleh variabel di luar model sehingga untuk penelitian lebih lanjut, analisis tambahan tentang variabel seperti pendidikan dan kultural yang mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai solusi pengangguran di Jawa Barat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alkofahi, K. (2020) "The Effect of Foreign Direct Investment on the Unemployment Rate in Saudi Arabia," *International Journal of Economics and Finance*, 12(10), hal. 1. doi: 10.5539/ijef.v12n10p1.
- Basuki, A. T. dan Prawoto, N. (2017) *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi SPSS & Eviews)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Borjas, G. J. (2010) *LABOR ECONOMICS*. Sixth. New York: McGraw-Hill Higher Education.
- Case, K. E., Fair, R. C. dan Oster, S. M. (2012) *Case & Fair Principles of Economics 10th Edition*. Pearson.
- Christianto, S. Y., Prasetyani, D. dan Rawidyo Putr, T. (2022) "The Effect of Inflation Rate, Economic Growth Rate and Minimum Wages on Open Unemployment Rate in East Java Year 2013–2021," *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 06(12), hal. 42–53. doi: 10.51505/ijebmr.2022.61204.
- DJPb Jawa Barat (2022) *Kajian Fiskal Regional Tahunan 2022*. Tersedia pada: <https://djpj.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/data-publikasi/kajian-fiskal-regional/3116-kfr-tahunan-2022.html>.
- DPMPTSP Jawa Barat (2022) *Laporan Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022*. Tersedia pada: <https://dpmptsp.jabarprov.go.id/realisasi-investasi/>.
- Efrianti, R., Irawan, A. dan Akbar, A. (2021) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 – 2019," *KLASSEN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 1(1), hal. 36–49.
- Gómez, M. dan Irewole, O. E. (2023) "Economic growth, inflation and unemployment in Africa: an autoregressive distributed lag bounds testing approach, 1991–2019," *African Journal of Economic and Management Studies*. doi: 10.1108/AJEMS-09-2022-0378.
- Gujarati, D. N. dan Porter, D. C. (2009) *Basic Econometrics (Fifth Edition)*. Fifth, *Introductory Econometrics: A Practical Approach*. Fifth.
- Hasan, Z. dan Sasana, H. (2020) "Determinants of youth unemployment rate in Asean," *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), hal. 6687–6691.
- Helvira, R. dan Rizki, E. P. (2020) "Pengaruh Investasi, Upah Minimum, dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat," *Journal of Islamic Economy and Business (JIsEB)*, 1(1), hal. 53–62. Tersedia pada: <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jiseb>.
- Kukaj, H., Nimani, A. dan Usaj, V. (2022) "Foreign Direct Investment, Economic Growth, and Unemployment: Evidence From Developing Countries," *Journal of Governance and Regulation*, 11(2 Special issue), hal. 293–300. doi: 10.22495/jgrv11i2siart8.
- Lequiller, F. dan Blades, D. (2014) *Understanding National Accounts*. Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264214637-en.
- Mahroji, D. dan Nurkhasanah, I. (2019) "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1). doi: 10.35448/jequ.v9i1.5436.
- Mankiw, N. G. (2007) *Makroekonomi, Edisi Keenam*. 6th ed, Jakarta : Erlangga. 6th ed.
- Mankiw, N. G., Quah, E. dan Wilson, P. (2014) *Pengantar Ekonomi Makro: Edisi Asia, Book*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Michael, E. dan Geetha, C. (2020)

- “Macroeconomic Factors That Affecting Youth Unemployment in Malaysia,” *Malaysian Journal of Business and Economics (MJBE)*, 7(2), hal. 181. doi: 10.51200/mjbe.vi.2890.
- Mkombe, D. *et al.* (2021) “The effects of foreign direct investment on youth unemployment in the Southern African Development Community,” *Development Southern Africa*, 38(6), hal. 863–878. doi: 10.1080/0376835X.2020.1796598.
- Mulyadi (2003) *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prayitno, A. R. D. dan Kusumawardani, D. (2022) “Open Unemployment Rate in The Province of East Java,” *The Winners*, 23(1), hal. 11–18. doi: 10.21512/tw.v23i1.7047.
- Sabado, J. R. F., Millan, K. A. dan Asoy, D. M. (2023) “The Relationship of Foreign Direct Investment and Unemployment Rate in the Philippines,” *Journal of Asian Development*, 9(1), hal. 32–52. doi: 10.52941/jad.v9i1.44.
- Saputri, K. D. dan Ananda, C. F. (2023) “Pengaruh Belanja Daerah, PMDN, dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa,” *Journal of Development Economics and Social Studies*, 2(4), hal. 800–813.
- Septiyanto, W. G. dan Tusianti, E. (2020) “Analisis Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(2), hal. 119–131. doi: 10.52813/jei.v9i2.40.
- Setiawan, J., Saleh, M. dan Yuliati, L. (2017) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 ( Analysis of Factors Affecting Unemployment Rate in East Java Province Year,” *Ekulilibrium*, II(1), hal. 31–37.
- Todaro, M. P. dan Smith, S. C. (2020) *Economic Development (Thirteenth Edition)*. Pearson.
- Vitaliano, D. F. (2023) “The Minimum Wage and Natural Rate of Unemployment,” *Atlantic Economic Journal*, 51(2–3), hal. 189–202. doi: 10.1007/s11293-023-09780-x.
- Wirawan, I. dan Sentosa, S. U. (2021) “Analysis of Factors Affecting the Unemployment Rate of Educational Labor in Indonesia,” in *Proceedings of the Seventh Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2021)*, hal. 93–97. doi: 10.46799/jss.v3i6.483.